

NOTULEN
FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) TAHAP I PENYUSUNAN GDPK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hari/Tanggal: Selasa, 17 September 2024

Tempat: Aula Bawi Bahalap DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Penyelenggara: DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Peserta:

1. Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
2. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
7. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah
8. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
9. Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
11. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah
12. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
13. Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah
14. Badan Riset dan Inovasi Nasional

Agenda FGD:

1. Pembukaan
2. Penyampaian Latar Belakang Penyusunan GDPK
3. Pemaparan Narasumber
4. Diskusi dan Sesi Tanya Jawab
5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Materi Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

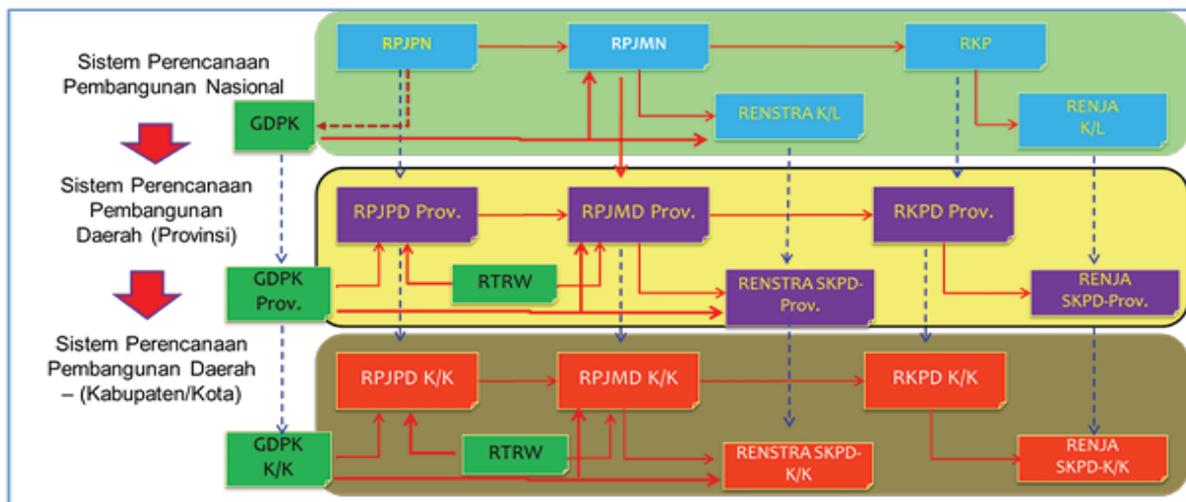
Tujuan rapat Penyusunan GDPK ini adalah untuk merencanakan dan menyusun kerangka kerja untuk GDPK. Rapat ini difokuskan pada persiapan dan penyusunan kebijakan atau panduan terkait pengelolaan pembangunan kependudukan, yang sering melibatkan berbagai instansi dan pemangku kepentingan. Hal-hal penting lainnya terkait hal tersebut adalah:

- Peran koordinasi antar lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa pelaksanaan GDPK sesuai dengan target dan kebijakan nasional.
- Pembahasan terkait sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung program dan kebijakan yang direncanakan.

- Penekanan pada pendekatan yang inklusif, mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan kependudukan.

GDPK disusun tidak boleh terpisah dari RPJMD. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan rancangan induk pembangunan kependudukan yang diderivasi mengacu kepada RPJPN yang sudah dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, untuk menjadi acuan K/L serta Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan kependudukan, kedudukan GDPK pada hakikatnya dapat menjadi acuan untuk RPJMN atau RPJMD. Penyusunan Dokumen Grand Design Kependudukan 5 Pilar Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045.

Adapun panduan penyusunan sebagai berikut :



Dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang GDPK, pasal 4 disebutkan bahwa strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 pilar pembangunan, yaitu:

1. Pengendalian kuantitas penduduk

Grand Design Kependudukan merupakan kerangka perencanaan strategi jangka panjang untuk mengelola aspek kependudukan secara holistik. Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah salah satu dari lima pilar yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan kapasitas wilayah dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

Adapun isu-isu strategis yang terkait pilar ini antara lain:

- a. Program Keluarga Berencana (KB) antara lain Peningkatan akses layanan KB, Pendidikan dan kampanye kesadaran serta pemberdayaan perempuan
- b. Pengendalian Migrasi antara lain Penguatan kebijakan migrasi dan Pengembangan kawasan pedesaan
- c. Regulasi Perkawinan dan Usia Kelahiran

2. Peningkatan kualitas penduduk

Tujuan dari pilar ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah melalui peningkatan di sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan ketenagakerjaan. Dengan kualitas penduduk yang lebih baik, diharapkan produktivitas dan daya saing Provinsi Kalimantan Tengah di tingkat nasional dan global

Adapun isu-isu strategis yang terkait pilar ini antara lain:

- a. Peningkatan Kualitas Pendidikan
 - Pemerataan akses pendidikan berkualitas
 - Penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan kerja
 - Pendidikan literasi digital
 - Beasiswa dan dukungan pendidikan tinggi
- b. Peningkatan Kesehatan Penduduk
 - Penurunan angka stunting dan gizi buruk
 - Perbaikan akses layanan kesehatan
 - Program kesehatan ibu dan anak
 - Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana (KB)
- c. Peningkatan Keterampilan dan Daya Saing Tenaga Kerja
 - Pengembangan pelatihan keterampilan kerja
 - Penyediaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM
 - Penguatan kemitraan industri
- d. Peningkatan Kesejahteraan Sosial
 - Program perlindungan sosial
 - Peningkatan layanan air bersih dan sanitasi
- e. Penguatan Moral dan Karakter Bangsa
 - Pendidikan karakter
 - Pemberdayaan pemuda melalui organisasi kepemudaan

3. Pembangunan keluarga

Pembangunan Keluarga mencakup aspek-aspek berikut:

- a. **Penguatan Kualitas Keluarga:** Fokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang memadai untuk menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif.
- b. **Pemberdayaan Keluarga:** Melibatkan program-program yang bertujuan meningkatkan peran serta keluarga dalam pembangunan sosial dan ekonomi, seperti pemberdayaan perempuan, akses kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan anak.
- c. **Penguatan Nilai-Nilai Keluarga:** Meningkatkan kesadaran akan pentingnya fungsi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dengan memperkuat nilai-nilai moral, agama, dan sosial budaya dalam mendukung ketahanan keluarga.
- d. **Akses terhadap Layanan Keluarga:** Mendorong akses yang lebih baik ke berbagai layanan sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, yang membantu keluarga berkembang secara holistik.
- e. **Kebijakan Inklusif:** Memastikan bahwa kebijakan pembangunan keluarga bersifat inklusif, mempertimbangkan keluarga rentan seperti keluarga miskin, difabel, atau lansia, agar turut berperan dalam pembangunan nasional.

Keseluruhan strategi pembangunan keluarga ini bertujuan untuk memperkuat fondasi sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup keluarga secara berkelanjutan

4. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk;

Dalam penyusunan GDPK Kalimantan Tengah Tahun 2024, poin-poin penting terkait Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk meliputi:

- a. Pengendalian Persebaran Penduduk: Mengarahkan pertumbuhan penduduk agar tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu, melainkan tersebar secara merata untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah perkotaan dan mendukung pembangunan di daerah-daerah yang kurang berkembang.
- b. Pengarahan Mobilitas Penduduk: Mengatur pergerakan penduduk, baik internal (antar-daerah) maupun eksternal (masuk/keluar daerah), dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini termasuk menciptakan insentif untuk mengarahkan penduduk ke wilayah yang lebih membutuhkan tenaga kerja atau memiliki potensi pembangunan yang lebih tinggi.
- c. Pengembangan Wilayah Baru: Mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar di daerah-daerah baru untuk mendukung persebaran penduduk, sehingga daerah tersebut lebih menarik bagi masyarakat untuk bermigrasi dan menetap.
- d. Penguatan Konektivitas Antarwilayah: Meningkatkan jaringan transportasi dan komunikasi untuk mendukung mobilitas penduduk antar-wilayah dengan tujuan mempermudah akses ke pekerjaan, layanan publik, dan peluang ekonomi.
- e. Penyusunan Kebijakan Penataan Wilayah: Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan strategi pembangunan kependudukan agar setiap wilayah di Kalimantan Tengah memiliki daya dukung yang memadai bagi pertumbuhan penduduk.
- f. Mitigasi Dampak Urbanisasi: Mengelola dampak urbanisasi yang tidak terkendali dengan memperhatikan aspek lingkungan, seperti pencemaran, kemacetan, dan penurunan kualitas hidup di daerah perkotaan. Fokus pada penyediaan perumahan yang layak dan infrastruktur dasar di daerah urban dan suburban.

Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa mobilitas dan persebaran penduduk di Kalimantan Tengah berjalan seimbang dan mendukung pembangunan wilayah secara berkelanjutan

5. Penataan administrasi kependudukan.

Dalam penyusunan GDPK Kalimantan Tengah Tahun 2024, poin-poin penting terkait Penataan Administrasi Kependudukan mencakup beberapa aspek berikut:

- a. **Penguatan Sistem Pencatatan Sipil:** Meningkatkan akses dan kualitas layanan pencatatan sipil, seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan dokumen kependudukan lainnya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penduduk terdaftar dengan baik dalam sistem administrasi negara.
- b. **Digitalisasi Layanan Kependudukan:** Mendorong transformasi digital dalam layanan administrasi kependudukan untuk mempercepat dan mempermudah proses pendaftaran, perubahan data, dan akses terhadap dokumen kependudukan secara daring (online).
- c. **Validasi dan Integrasi Data Kependudukan:** Melakukan validasi dan pembaruan data kependudukan secara berkala untuk memastikan keakuratan data. Selain itu,

integrasi data dengan instansi lain untuk memudahkan aksesibilitas dan pemanfaatan data oleh berbagai lembaga pemerintahan.

- d. **Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah:** Meningkatkan keterampilan dan kapasitas aparatur yang menangani administrasi kependudukan, termasuk pelatihan terkait penggunaan teknologi dan pelayanan publik yang efektif.
- e. **Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan:** Mendorong masyarakat, terutama kelompok rentan seperti penduduk miskin, lansia, dan difabel, untuk memiliki dokumen kependudukan yang sah. Ini penting untuk akses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
- f. **Penyederhanaan Proses Administratif:** Mengurangi prosedur birokrasi yang berbelit dalam pengurusan dokumen kependudukan, dengan tujuan mempercepat pelayanan dan mengurangi beban administratif bagi masyarakat.
- g. **Penegakan Hukum dan Kepatuhan:** Menegakkan aturan yang mewajibkan pendaftaran penduduk dan kepatuhan terhadap administrasi kependudukan, termasuk sanksi bagi yang tidak melaporkan perubahan status atau alamat.
- h. **Kolaborasi Antar Lembaga:** Memastikan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait lainnya untuk memperkuat sistem administrasi kependudukan yang terpadu dan efektif.

Poin-poin ini bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang lebih efisien, inklusif, dan mampu mendukung pembangunan di Kalimantan Tengah

Tahapan Penyusunan GDPK 5 Pilar, antara lain:

- a. Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan GDPK 5 Pilar.
- b. Penyusunan kajian akademis GDPK 5 Pilar.
- c. Penyusunan proyeksi penduduk 25 tahun.
- d. Penyusunan visi-misi dan arah kebijakan pembangunan kependudukan 25 tahun.
- e. Harmonisasi dan penetapan visi-misi, arah kebijakan pembangunan kependudukan 25 tahun.
- f. Penyusunan *Roadmap* Pembangunan Kependudukan 25 Tahun.
- g. Penyusunan Naskah GDPK 5 Pilar.
- h. Penyetapan Dokumen Rancangan GDPK 5 Pilar.
- i. Pengesahan dan Penetapan Dokumen GDPK
- j. Publikasi dan sosialisasi.
- k. Pelaporan.

Sistematika Penulisan

▪ **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang tujuan dan sasaran pengertian kedudukan ruang lingkup dan pendekatan pengembangan *grand design* pembangunan kependudukan.

▪ **Bab II Analisis situasi kependudukan dan capaian pembangunan kependudukan**

Bab ini berisikan analisis situasi kependudukan dan capaian pelaksanaan pembangunan pilar kependudukan yang mendeskripsikan sejumlah temuan yang merupakan hasil dari kajian dokumen kebijakan kajian praktik program unggulan maupun kajian akademik.

- **Bab III Proyeksi penduduk dan kondisi ideal kependudukan**

Bab ini berisi data parameter kependudukan tahun hasil perhitungan proyeksi analisis potensi serta dampak yang ditimbulkan serta kondisi ideal yang diharapkan.

- **Bab IV Visi dan isu strategis pembangunan kependudukan daerah.**

Bagian ini menjabarkan visi - misi dan isu strategis dari GDPK yang diharapkan menjadi rujukan berbagai pemangku kepentingan nasional maupun daerah.

- **Bab V Kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan daerah**

Bab ini menguraikan sejumlah arahan strategis kebijakan daerah dalam pembangunan pilar kependudukan yang diharapkan dapat terinternalisasi dalam penjabaran operasional di berbagai dokumen pembangunan sesuai penahapan yang direncanakan pada lima pilar pembangunan kependudukan.

- **Bab VI Peta Jalan (*roadmap*)**

Bagian ini merupakan penahapan implementasi GDPK sesuai periode tertentu (5 tahunan). Selain penahapan yang bersifat umum sebagai derivasi RPJPN, terdapat pula penahapan akselerasi yang diproyeksikan sebagai upaya percepatan pemenuhan kebutuhan pembangunan kependudukan (program prioritas).

- **Bab VII Penutup**

Berisi kesimpulan serta rekomendasi kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan.

Diskusi

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah

Peran Bappedalitbang antara lain:

1. **Penyusunan Rencana Strategis:**

- Menyusun dokumen perencanaan strategis yang mencakup visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah dalam GDPK.
 - Mengembangkan rencana aksi yang jelas untuk implementasi GDPK.
2. **Pengumpulan dan Analisis Data:**
- Mengumpulkan, menganalisis, dan memvalidasi data yang diperlukan untuk penyusunan GDPK.
 - Menggunakan data tersebut untuk mendukung pembuatan keputusan yang berbasis bukti.
3. **Koordinasi dan Sinergi:**
- Memfasilitasi koordinasi antara berbagai stakeholder dalam proses perencanaan dan implementasi GDPK.
 - Mendorong sinergi antara program-program pembangunan yang ada.

Dinkes

AKI,AKB, Angka Kematian Balita dan capaian 10 tahun terakhir dan target sampai dengan 2045, Umur Harapan Hidup, Angka Kesakitan serta jaminan Kesehatan

Dinas Pendidikan

Peran Dinas Pendidikan antara lain:

1. **Penyusunan Rencana Pendidikan:**
 - Mengembangkan rencana pendidikan jangka panjang yang sejalan dengan GDPK, mencakup aspek infrastruktur, kurikulum, dan pengembangan sumber daya manusia.
 - Merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.
2. **Pengembangan Infrastruktur Pendidikan:**
 - Memastikan bahwa rencana penataan kota mencakup pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan, dan pusat belajar.
 - Mengidentifikasi lokasi strategis untuk pembangunan institusi pendidikan.
3. **Koordinasi Program Pendidikan:**
 - Berkolaborasi dengan instansi lain untuk mengintegrasikan program pendidikan dengan rencana pembangunan kota.
 - Mendorong sinergi antara program-program pendidikan dan sektor lain seperti ekonomi dan kesehatan.
4. **Peningkatan Kapasitas SDM:**
 - Mengadakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
 - Menyediakan dukungan bagi pengembangan keterampilan siswa agar siap menghadapi tantangan di masa depan.

BPS

Data proyeksi penduduk tersedia sampai tahun 2035 di BPS. Ada beberapa data yang diinginkan tidak tersedia di BPS namun tersedia di OPD lain seperti BKKBN dan lainnya,

Perwakilan BKKBN

Diharapkan nanti pada saat menyampaikan data sebelumnya dapat berkonsultasi dengan pimpinan masing-masing OPD.

Dukcapil

Dukcapil siap memberikan data terkait data agregat layanan dan kependudukan. Selain itu yang diperlukan antara lain Data KTP, Akta Lahir, Kartu Nikah, KIA dan lain-lain

Biro Hukum

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) harus diusulkan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Proses ini umumnya dilakukan oleh pemerintah daerah, DPRD, atau pihak lain yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengajuan Raperda juga harus disertai dengan naskah akademik sebagai dokumen pendukung yang berisi kajian ilmiah dan argumentasi yang melandasi penyusunan peraturan tersebut. Naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan justifikasi ilmiah dan hukum atas materi muatan dalam Raperda.

Dengan demikian, pengusulan Raperda GDPK memerlukan proses formal dan harus didukung dengan argumen yang kuat dalam bentuk naskah akademik yang komprehensif.

Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah berperan, antara lain :

- a. Mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk penyusunan GDPK, termasuk data demografi, ekonomi, sosial, dan lingkungan
- b. Mengembangkan aplikasi atau platform digital yang memudahkan akses informasi bagi pemangku kepentingan dan masyarakat.
- c. Mengkomunikasikan rencana dan strategi yang tertuang dalam GDPK kepada publik melalui media massa, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya.

Disnakertrans

Permasalahan kualitas dan kuantitas penduduk harus diperhatikan. Permasalahan di Kalteng antara lain :

- **Tingkat Pengangguran:** Salah satu masalah utama adalah tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan penduduk usia produktif. Keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah ini sering kali tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia.
- **Keterampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja:** Banyak tenaga kerja lokal yang belum memiliki keterampilan atau kompetensi yang memadai, sehingga mereka sulit bersaing dalam pasar kerja. Kurangnya akses terhadap pelatihan keterampilan juga menjadi masalah utama.

- **Minimnya Peluang Kerja di Daerah Transmigrasi:** Wilayah-wilayah transmigrasi sering kali kurang berkembang dari sisi ekonomi, sehingga minim peluang pekerjaan bagi para transmigran. Banyak dari mereka yang akhirnya kembali ke daerah asal atau menganggur di wilayah tersebut.
- **Mobilitas Penduduk yang Tinggi:** Banyak penduduk lokal, terutama generasi muda, cenderung bermigrasi ke kota-kota besar atau bahkan ke luar daerah dalam mencari pekerjaan yang lebih baik. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan kebutuhan tenaga kerja lokal.
- **Kurangnya Investasi Industri:** Industri yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, seperti manufaktur, masih sangat minim di Kalteng. Hal ini menyebabkan dominasi sektor informal dan sulitnya pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
- **Ketimpangan Keterampilan dengan Kebutuhan Industri:** Banyak tenaga kerja lokal di Kalteng yang belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri swasta. Sektor-sektor seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan membutuhkan keterampilan khusus yang sering kali tidak dimiliki oleh penduduk lokal. Akibatnya, banyak perusahaan swasta yang mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah.

Dinas Sosial

Dinas Sosial berperan dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung pengentasan kemiskinan melalui program perlindungan sosial. Ini selaras dengan pilar pembangunan keluarga dalam GDPK, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan. Dinas Sosial memainkan peran penting dalam memastikan bahwa program dan kebijakan kependudukan yang disusun dalam GDPK dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah

Dinas Koperasi dan UKM dapat mengambil peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk dan kesejahteraan keluarga melalui kewirausahaan dan pengembangan koperasi. UKM juga diharapkan dapat berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi daerah. Ini mencakup pelatihan, akses ke modal, dan pendampingan bisnis untuk memperkuat pilar Peningkatan kualitas penduduk dalam GDPK.


 KEMENTERIAN P3APPKB
 GOVINSI KALIMANTAN TENGAH,
 dr. VICTORIA ADEN, M.M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680717 199903 2 006

NOTULEN
FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) TAHAP I PENYUSUNAN GDPK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hari/Tanggal: Rabu, 30 Oktober 2024

Tempat: Aula Bawi Bahalap DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Penyelenggara: DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Peserta:

1. Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
2. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
7. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah
8. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
9. Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
11. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah
12. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
13. Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah
14. Badan Riset dan Inovasi Nasional

Agenda

- a. Pembahasan Pilar 1: Pengendalian Kuantitas Penduduk
- b. Pembahasan Pilar 2: Peningkatan Kualitas Penduduk
- c. Pembahasan Pilar 3: Pembangunan Keluarga

Ringkasan Pembahasan

Pilar 1: Pengendalian Kuantitas Penduduk

Tujuan: Mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk untuk mencapai keseimbangan antara jumlah dan kualitas penduduk.

Strategi:

- a. Implementasi program keluarga berencana yang efektif.
- b. Penyuluhan dan edukasi mengenai pengendalian kelahiran.

- c. Pengembangan kebijakan yang mendukung pengendalian jumlah penduduk.

Hasil Diskusi:

Beberapa rekomendasi penting terkait Pilar 1, yaitu Pengendalian Kuantitas Penduduk, diusulkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Program Keluarga Berencana : Memperkuat dan memperluas akses program keluarga berencana untuk mengurangi angka kelahiran dan membantu dalam merencanakan masyarakat jumlah anggota keluarga secara efektif.
- b. Edukasi dan Penyuluhan : Melaksanakan kampanye edukasi yang mengintensifkan mengenai pentingnya pengendalian jumlah penduduk dan manfaat dari perencanaan keluarga. Ini termasuk penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak keluarga.
- c. Pengembangan Kebijakan Kependudukan yang Efektif : Menyusun dan menerapkan kebijakan yang mendukung pengendalian jumlah penduduk, termasuk insentif bagi keluarga yang mengikuti program keluarga berencana.
- d. Kolaborasi Antar Instansi : Mendorong kerjasama antara berbagai instansi pemerintah, LSM, dan komunitas lokal untuk meningkatkan efektivitas program pengendalian kuantitas penduduk.
- e. Penggunaan Data Akurat : Mengumpulkan dan memanfaatkan data demografi yang akurat untuk merencanakan dan mewujudkan kebijakan pengendalian penduduk secara lebih efektif.
- f. Monitoring dan Evaluasi : Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk menilai keberhasilan program-program yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.

Rekomendasi-rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan pertumbuhan penduduk yang seimbang, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pilar 2: Peningkatan Kualitas Penduduk

Tujuan: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Strategi:

- a. Penyediaan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
- b. Peningkatan fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan masyarakat.
- c. Program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Hasil Diskusi:

Beberapa rekomendasi utama terkait Pilar 2, yaitu Peningkatan Kualitas Penduduk, diusulkan sebagai berikut:

- a. Pendidikan Berkualitas : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Ini mencakup pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan peningkatan kompetensi guru.
- b. Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau : memperbaiki fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini termasuk program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan.
- c. Pemberdayaan Ekonomi : Mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas kerja masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah.
- d. Peningkatan Kesejahteraan Sosial : Memberikan bantuan sosial bagi kelompok rentan serta meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan air bersih.
- e. Kampanye Kesadaran Masyarakat : Melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan kualitas masyarakat.
- f. Monitoring dan Evaluasi Program : Membaca sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas program-program yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas masyarakat.

- g. Diperlukan sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik.
- h. Perlu adanya pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja

Rekomendasi-rekomendasi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, terdidik, dan memiliki keterampilan yang memadai untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pilar 3: Pembangunan Keluarga

Tujuan: Membangun keluarga yang sejahtera, sehat, dan harmonis.

Strategi:

- a. Program peningkatan ketahanan keluarga melalui pendidikan nilai-nilai keluarga.
- b. Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.
- c. Dukungan terhadap kelompok-kelompok masyarakat dalam pengembangan ekonomi keluarga.

Hasil Diskusi:

Beberapa rekomendasi utama terkait Pilar 3, yaitu Pembangunan Keluarga, diusulkan sebagai berikut:

- a. Program Ketahanan Keluarga : Mendorong program pengembangan yang fokus pada peningkatan ketahanan keluarga melalui pendidikan nilai-nilai keluarga, kesehatan, dan kesejahteraan.
- b. Edukasi Kesehatan Reproduksi : Melaksanakan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesehatan dan perencanaan dalam keluarga.
- c. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga : Mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi yang mendukung keluarga dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, termasuk pelatihan keterampilan dan akses ke modal usaha.
- d. Dukungan untuk Kelompok Masyarakat : Memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam program-program pengembangan yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, seperti kelompok wanita atau kelompok tani.

- e. Peningkatan Akses Layanan Sosial : memblokir akses yang lebih baik terhadap layanan sosial dan kesehatan bagi keluarga, terutama bagi kelompok rentan dan kurang mampu.
- f. Monitoring dan Evaluasi Program Keluarga : Mengingat sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas program-program yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan keluarga.
- g. Perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam pembangunan keluarga, yang melibatkan berbagai pihak seperti LSM dan komunitas lokal.
- h. Penekanan pada pentingnya peran serta laki-laki dalam program-program pemberdayaan keluarga.

Rekomendasi-rekomendasi ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, sehat, dan harmonis, serta mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Rapat menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam pelaksanaan GDPK. Setiap pilar harus diintegrasikan dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.

Tindak Lanjut

1. Penyusunan dokumen rencana aksi untuk setiap pilar.
2. Penjadwalan rapat lanjutan untuk evaluasi kemajuan pelaksanaan GDPK.

Penutup

Rapat ditutup dengan harapan agar semua pihak dapat berkontribusi aktif dalam pelaksanaan GDPK demi kemajuan Provinsi Kalimantan Tengah.


KEPONTAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
DINAS P3APPKB
diwakili oleh VICTORIA ADEN ,M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

NOTULEN
FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) TAHAP I PENYUSUNAN GDPK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hari/Tanggal: Kamis, 31 Oktober 2024

Tempat: Aula Bawi Bahalap DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Penyelenggara: DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Peserta:

1. Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
2. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
7. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah
8. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
9. Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
11. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah
12. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
13. Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah
14. Badan Riset dan Inovasi Nasional

Agenda

- d. Pembahasan Pilar 4: Pengendalian Kuantitas Penduduk
- e. Pembahasan Pilar 5: Peningkatan Kualitas Penduduk

Ringkasan Pembahasan

Pilar 4: Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Tujuan: Mengelola dan memindahkan mobilitas penduduk untuk mencapai keseimbangan dalam persebaran penduduk di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Strategi:

- a. Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur transportasi dan aksesibilitas untuk mendukung mobilitas penduduk yang efisien.

- b. Kebijakan Migrasi: Menyusun kebijakan yang mendukung migrasi yang terencana, termasuk perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang kurang padat.
- c. Penyuluhan dan Edukasi : Melaksanakan program penyuluhan mengenai pentingnya penataan persebaran penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup.

Hasil Diskusi:

Berikut adalah rekomendasi utama dari Pilar 4:

- a. Pengembangan Infrastruktur Transportasi: Meningkatkan dan memperluas infrastruktur transportasi untuk mendukung mobilitas penduduk yang lebih baik. Ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi umum yang efisien.
- b. Kebijakan Migrasi Terencana: Menyusun kebijakan yang mendukung terencana migrasi, termasuk perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di wilayah tertentu dan mendistribusikan sumber daya secara lebih merata.
- c. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat: Melaksanakan program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penataan persebaran penduduk. Edukasi ini akan membantu masyarakat memahami manfaat dari pengaturan mobilitas penduduk yang lebih baik.
- d. Penggunaan Data Demografi: Mengumpulkan dan menganalisis data demografi secara akurat untuk merencanakan penataan persebaran penduduk. Data ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kependudukan.
- e. Kolaborasi Antar Instansi: Mendorong kerjasama antara berbagai instansi pemerintah, LSM, dan komunitas lokal dalam pelaksanaan program penataan persebaran penduduk. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.
- f. Perlunya data demografi yang akurat untuk merencanakan penataan persebaran penduduk.
- g. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan program ini.

Pilar 5: Penataan Administrasi Kependudukan

Tujuan: Meningkatkan sistem administrasi kependudukan agar lebih tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Strategi:

- a. Digitalisasi Data Penduduk: Mengimplementasikan sistem digital untuk pengelolaan data kependudukan yang memudahkan akses dan pengolahan informasi.
- b. Peningkatan Kapasitas SDM: Melatih petugas administrasi kependudukan untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan data.
- c. Sosialisasi Kebijakan Administrasi: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan yang baik.

Hasil Diskusi:

Beberapa rekomendasi utama terkait Pilar 5, yaitu Penataan Administrasi Kependudukan, diusulkan sebagai berikut:

- a. Digitalisasi Data Penduduk : Mengimplementasikan sistem digital untuk pengelolaan data kependudukan yang memudahkan akses dan pemrosesan informasi. Ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam administrasi kependudukan.
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) : Melatih petugas administrasi kependudukan agar memiliki kompetensi yang lebih baik dalam pengelolaan data dan pelayanan kepada masyarakat. Pelatihan ini harus mencakup penggunaan teknologi informasi terbaru.
- c. Integrasi Data Antar Instansi : Mendorong integrasi data kependudukan antara berbagai instansi pemerintah untuk menjamin konsistensi dan keakuratan informasi. Hal ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.
- d. Sosialisasi Kebijakan Administrasi : Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan yang baik dan benar. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses administrasi.
- e. Monitoring dan Evaluasi Sistem Administrasi : Membaca sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan administrasi kependudukan. Hal ini penting untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam sistem yang ada.

- f. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) : Menyusun dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam bentuk Perda sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan di tingkat daerah.
- g. Rekomendasi-rekomendasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
- h. Diperlukannya integrasi data antara berbagai instansi untuk mempermudah pengelolaan administrasi kependudukan.
- i. Pemantauan secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem administrasi berjalan dengan baik.

Rapat menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat penataan persebaran penduduk dan administrasi kependudukan di Kalimantan Tengah. Setiap pilar harus diintegrasikan dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Tindak Lanjut

- a. Penyusunan dokumen rencana aksi untuk setiap pilar.
- b. Penjadwalan rapat lanjutan untuk evaluasi kemajuan pelaksanaan GDPK.

Penutup

Rapat ditutup dengan harapan agar semua pihak dapat berkontribusi aktif dalam pelaksanaan GDPK demi kemajuan Provinsi Kalimantan Tengah.


KALIMANTAN P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
diwakili oleh VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

NOTULEN
FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) TAHAP III PENYUSUNAN GDPK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hari/Tanggal: Kamis, 5 Desember 2024

Tempat: Aula Bawi Bahalap DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Penyelenggara: DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Peserta:

1. Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
2. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
7. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah
8. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
9. Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
11. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah
12. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
13. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
14. Badan Riset dan Inovasi Nasional

Poin-Poin Diskusi:

Pemaparan Tim Penyusun:

Isu utama: Prevalensi stunting, ketahanan keluarga remaja, lansia, dan lingkungan fisik keluarga di Kalimantan Tengah memerlukan perhatian khusus.

Data utama:

- a. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) masih perlu ditingkatkan.
- b. Persentase rumah layak huni, akses sanitasi, dan air bersih menunjukkan disparitas antar kabupaten/kota.
- c. Prevalensi stunting menunjukkan penurunan tetapi masih di atas target nasional.

Masukan dari Peserta Diskusi:

Peningkatan Ketahanan Balita dan Anak:

- a. Perlunya penguatan program Bina Keluarga Balita (BKB) di daerah terpencil.
- b. Edukasi ASI eksklusif dan imunisasi harus lebih intensif dengan melibatkan kader Posyandu.

Ketahanan Remaja:

- a. Pentingnya mencegah perkawinan anak melalui pendidikan berbasis komunitas.
- b. Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) perlu diselaraskan dengan kurikulum pendidikan formal.

Ketahanan Lansia:

- a. Bina Keluarga Lansia (BKL) harus diperluas dengan program yang mendukung lansia tetap produktif.
- b. Penyediaan layanan kesehatan khusus untuk lansia di desa-desa.

Lingkungan Fisik Keluarga:

- a. Masalah sanitasi dan akses air bersih memerlukan intervensi lintas sektor.
- b. Rumah layak huni harus menjadi prioritas dalam kebijakan alokasi anggaran daerah.

Strategi dan Rekomendasi:

- a. Penguatan koordinasi lintas sektor antara DP3APPKB, Dinas Kesehatan, dan Bappeda.
- b. Penetapan target capaian berbasis kabupaten untuk ketahanan balita, remaja, dan lansia.
- c. Pemanfaatan data berbasis digital untuk memantau kemajuan program BKB, BKR, dan BKL.
- d. Pelibatan lebih aktif masyarakat dan LSM dalam pelaksanaan program-program keluarga.

Tindak Lanjut:

- a. Penyempurnaan dokumen GDPK Pilar 3 berdasarkan masukan FGD.
- b. Penyusunan roadmap operasional Pilar 3 untuk periode 2025-2045.
- c. Koordinasi lebih lanjut antara tim penyusun dan pemangku kepentingan untuk finalisasi dokumen GDPK.


KEPONTAAN P3APPKB
GOVINSI MANTAN TENGAH,
di
VICTORIA ADEN ,M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

NOTULEN
FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) TAHAP III PENYUSUNAN GDPK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hari/Tanggal: Jum'at, 06 Desember 2024

Tempat: Aula Eka Hapakat Sekda Provinsi Kalimantan Tengah

Penyelenggara: DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Peserta:

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional
2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
4. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
7. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Prov Kalimantan Tengah
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
9. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah
10. Biro Hukum SETDA Provinsi Kalimantan Tengah
11. Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
12. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
13. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
14. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
15. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah
17. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
18. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
19. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Tengah
21. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
22. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah
23. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah
24. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah
25. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Prov. Kalimantan Tengah
26. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
27. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
28. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
29. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
30. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
31. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah

Agenda:

1. Pemaparan hasil sementara Pilar 4 dan 5 GDPK oleh tim penyusun.
2. Diskusi tantangan dan peluang terkait penataan mobilitas penduduk dan administrasi kependudukan.
3. Penajaman indikator dan rekomendasi kebijakan Pilar 4 dan 5.

Poin-Poin Diskusi:

1. Pilar 4: Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Pemaparan Tim Penyusun:

- **Masalah utama:** Ketimpangan persebaran penduduk dan urbanisasi tinggi di beberapa wilayah.
- **Data utama:**
 - Wilayah dengan kepadatan rendah menghadapi tantangan infrastruktur.
 - Tingginya tingkat urbanisasi di beberapa Kabupaten dan Kota menyebabkan tekanan pada fasilitas kab/kota.
 - Mobilitas non-permanen pekerja meningkat, terutama untuk sektor pertambangan dan perkebunan.

Masukan Peserta Diskusi:

- **Persebaran Penduduk:**
 - Perlunya pengembangan kawasan ekonomi baru untuk mengurangi beban kota Palangka Raya.
 - Optimalisasi transmigrasi lokal untuk meningkatkan daya dukung daerah dengan penduduk rendah.
- **Mobilitas Penduduk:**
 - Penyediaan data yang lebih rinci tentang pekerja komuter untuk meningkatkan pelayanan transportasi.
 - Perlunya program pelatihan kerja di daerah asal untuk mengurangi urbanisasi.

Rekomendasi:

1. Pemanfaatan teknologi digital untuk memantau mobilitas dan persebaran penduduk.
2. Pengembangan wilayah baru berbasis potensi lokal melalui insentif ekonomi.
3. Penyusunan kebijakan khusus untuk mengatur urbanisasi dan migrasi komuter.

2. Pilar 5: Penataan Administrasi Kependudukan

Pemaparan Tim Penyusun:

- **Masalah utama:** Ketidakmerataan cakupan administrasi kependudukan di wilayah terpencil.
- **Data utama:**
 - Cakupan KTP elektronik di beberapa kabupaten seperti Murung Raya dan Sukamara masih rendah.
 - Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum merata di seluruh kabupaten/kota.

Masukan Peserta Diskusi:

- **Pelayanan Administrasi:**
 - Layanan jemput bola oleh Disdukcapil perlu diperluas ke daerah terpencil.
 - Penggunaan teknologi berbasis aplikasi untuk mempercepat proses registrasi dan pencatatan.
- **Integrasi Data Kependudukan:**
 - Pentingnya mengintegrasikan data kependudukan dengan layanan kesehatan dan pendidikan.
 - Sistem database kependudukan harus mendukung sinkronisasi antar kabupaten/kota.

Rekomendasi:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Disdukcapil untuk mendukung layanan digital.

2. Memperluas cakupan layanan IKD dengan pendekatan berbasis komunitas.
3. Penetapan standar pelayanan minimum untuk pencatatan sipil di daerah terpencil.
4. Mengintegrasikan data kependudukan dengan program penanggulangan kemiskinan dan pendidikan.

Tindak Lanjut:

1. Penyempurnaan dokumen GDPK Pilar 4 dan 5 berdasarkan masukan FGD.
2. Penyusunan roadmap operasional untuk Pilar 4 dan 5, mencakup target jangka pendek, menengah, dan panjang.
3. Koordinasi lintas sektor dengan Disdukcapil, Bappeda, DP3APPKB dan OPD terkait lainnya untuk implementasi kebijakan terkait.


KEPONTAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
DINAS P3APPKB
di Kalimantan Tengah
VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

NOTULEN
RAPAT PENENTUAN TARGET ROADMAP GDPK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hari/Tanggal: Senin 23 Desember 2024

Tempat: Aula Bawi Bahalap Provinsi Kalimantan Tengah

Penyelenggara: DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Peserta:

15. Sekretaris DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
16. Kepala Bidang I DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah beserta Staf
17. Kepala Bidang II DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah beserta Staf
18. Kepala Bidang III DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah beserta Staf
19. Kepala Bidang IV DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah beserta Staf
20. Kepala Bidang V DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah beserta Staf
21. Kepala UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah
22. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah beserta Staf
23. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah beserta Staf
24. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah beserta Staf
25. Kepala Seksi Pengaduan UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah beserta Staf
26. Kepala Seksi Tindak Lanjut UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah beserta Staf
27. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
28. OPD terkait Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Agenda:

1. Pembahasan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045.
2. Penentuan langkah implementasi roadmap GDPK sesuai dengan program dan kegiatan DP3APPKB.

Hasil Pembahasan

1. Paparan Dokumen GDPK

- **Visi:** Mewujudkan penduduk berkualitas untuk mencapai Kalimantan Tengah Tangguh 2045.
- **Lima Pilar Strategis:**
 - Pengendalian Kuantitas Penduduk.
 - Peningkatan Kualitas Penduduk.
 - Pembangunan Keluarga.
 - Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk.
 - Penataan Administrasi Kependudukan.

2. Roadmap Implementasi GDPK (2025-2045)

- Fokus utama pada:
 - **2025-2030:** Optimalisasi program keluarga berencana, pengurangan stunting, dan digitalisasi data kependudukan.
 - **2031-2040:** Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ketahanan keluarga.
 - **2041-2045:** Mewujudkan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

3. Identifikasi Tantangan dan Solusi

- Tantangan:
 - Kesenjangan pembangunan antar wilayah.
 - Masalah urbanisasi tidak terkendali.
 - Kesulitan dalam koordinasi lintas sektor.
- Solusi yang diusulkan:
 - Penguatan perencanaan berbasis data.
 - Pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
 - Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

3. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

- **Bidang I** : Indikator Keberhasilan Pada Akhir Roadmap Terkait Kualitas Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025-2045 untuk indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.
- **Bidang III** : Indikator Keberhasilan Pada Akhir Roadmap Terkait Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025-2045, indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
- **Bidang V** : Indikator Keberhasilan Pada Akhir Roadmap Terkait Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025-2045, Perkawinan Anak
- **DP3APPKB**: Penanggung jawab utama pelaksanaan roadmap GDPK.
- **Dinas Pendidikan, Kesehatan, Sosial, dan lainnya**: Implementasi program-program sesuai pilar masing-masing.
- **Bappelitbangda**: Pemantauan dan evaluasi implementasi GDPK.

Rencana Tindak Lanjut

- Finalisasi rancangan dokumen GDPK menjadi Peraturan Gubernur/Peraturan Daerah (Pergub/Perda).
- Penyusunan anggaran dan sumber daya untuk pelaksanaan roadmap.
- Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Keputusan Rapat

1. Dokumen GDPK akan segera difinalisasi dalam bentuk Peraturan Gubernur/Peraturan Daerah (Pergub/Perda).
2. Pembentukan tim kerja lintas sektor untuk mendukung implementasi roadmap.



di
VICTORIA ADEN, M.M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680717 199903 2 006

